

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi, Rianto. 2015. *Aspek Hukum Dalam Penelitian, Edisi 1 Cetakan 1*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Asshiddiqie, Jimly dan Ali Safa'at. 2012. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.
- 2016. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: Fokusmedia, Anggota IKAPI.
- Goesniadhie, Kusnu. 2010. *Harmonisasi Sistem Hukum Mewujudkan Tata Pemerintah Yang Baik, Cetakan Pertama*. Malang: Penerbit A3 (Asah Asih Asuh) dan Nasa.
- Harjono, Dhaniswara K. 2007. *Hukum Penanaman Modal, Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Hart, H.L.A. 2013. *Konsep Hukum, Cetakan V*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- HS, Salim. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, Edisi 1 Cetakan III*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ilmar, Aminuddin, Prof., Dr., S.H., M.H., 2017. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Cetakan ke 5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ismail, Nurhasan. *Perkembangan Hukum Pertanahan Pendekatan Ekonomi Politik*, Magister Hukum UGM
- Jened, Rahmi, Prof., Dr., S.H., M.H., 2016. *Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung (Direct Investment)*. Kencana, Jakarta
- Kelsen, Hans. 2011. *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Cetakan IX*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Kiesecker, Joseph M. and David E. Naugle. 2017. *Energi Sprawl Solutions Balancing Global Development And Conservation*, Washington: Island Press.
- Mertokusumo, Sudikno. 2012. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Knörich, Jan and Berger, Axel, 2014. *Friends or Foes? Interactions between Indonesian's International Investment Agreements and National Investment law*, Deutsches Institut für Entwicklungspolitik, Bonn

- Bernhard, Limbong. 2017. *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Cetakan Keempat*. Jakarta: Margaretha Pustaka.
- Marzuki, H. M. (Januari 1997). Peraturan Kebijaksanaan ('Beleidsregel'): *Hakikat Serta Fungsinya Selaku Sarana Hukum Pemerintahan. Pro Justitia Tahun XV Nomor 1*.
- Mahfud, Moh. 2014. *Politik Hukum Di Indonesia. Edisi Revisi, Cetakan Ke 6*. Jakarta: Rajalawali Press.
- Mahendra, Yusril Ihza. 2003. *Perumusan Harmonisasi Hukum Bidang Penanaman Modal*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI.
- Rawls, John. 2011. *Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dan Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rajagukguk, Erman. 2007. *Hukum Investasi Di Indonesia, Anatomi Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia.
- Rasjidi, Lili dan Wyasa Putra, I.B. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sembiring, Sentosa. 2010. *Hukum Investasi, Pembahasan dilengkapi dengan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Cetakan ke II*, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia.
- Shea, Donald R., 1955. *The Calvo Clause: A Problem of Inter-American and International Law and Diplomacy*, University of Minnesota Press, Minneapolis.
- Soekanto, Soerjono, 1990. *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta:IND-HILL-CO.^[1]_{SEP}
- Sornarajah, M., 2010. *The International Law on Foreign Investment*, Third Edition, Cambridge University Press, Cambridge.
- Sugianto, Fajar. 2013. *Economic Approach To Law, Seri Analisis Ke-Ekonomian Tentang Hukum, Seri II Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Maria S.W, Sumardjono, Nurhasan Ismail, Ernan Rustiadi dan Abdullah Aman Damai. 2011. "Pengaturan Sumber Daya Alam Di Indonesia, Antara Yang Tersurat Dan Tersirat, Kajian Kritis Undang-Undang Terkait

Penataan Ruang dan Sumber Daya Alam,” Gajah Mada University Press,

Suny, Ismail dan Rochmat, Rudiono. 1971. *Tinjauan dan Pembahasan Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Kredit Luar Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Tang, Kenny and Ruth Yeoh. 2007. *Cut Carbon, Grow Profits Business Strategies For Managing Climate Change And Sustainability*. London: Middlesex University Press.

Yasin, Nazarkhan. 2014. *Kontrak Kontruksi Di Indonesia, Cetakan Pertama Edisi Kedua*. Jakarta: Gramedia Pustaka Indonesia.

Wells, Louse T. and Rafiq Ahmed. 2007. *Making Foreign Investmen Safe Property Rights And National Sovereignty*. New York: Oxford University Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)

Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 Tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746)

Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052)

Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5939)

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012)

Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281)

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609)

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor)

Peraturan Presiden No. 44 tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Dibidang Penanaman Modal tanggal 12 Mei 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812)

Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Rpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62)

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 90 Tahun 1968 Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Denmark mengenai Dorongan dan Perlindungan secara Timbal-Balik daripada Investasi-investasi (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Denmark concerning the Encouragement and the Reciprocal Protection of Investments*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 12)

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1993 Tentang Pengesahan Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Australia Concerning the Promotion and Protection of Investments (Lembaran Lepas Sekretariat Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 37)

Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Republic of Indonesia for the Promotion and Protection of Investments (mulai berlaku tanggal 24 Maret 1977)

- Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 13 Tahun 2017 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal tanggal 11 Desember 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1767)
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 10 Tahun 2017 Tentang Pokok-Pokok Perjanjian Jual Beli Listrik dengan PLN tanggal 23 Januari 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 151)
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 49 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pokok-Pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Tanggal 8 Agustus 2017 (Berita Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 1106)
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 11 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Pembangkit Tenaga Listrik tanggal 30 Januari 2017 (Berita Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 188)
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 45 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Pembangkit Tenaga Listrik tanggal 25 Juli 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1031)
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 12 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik tanggal 30 Januari 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 189)
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 43 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik tanggal 17 Juli 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 975)
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 50 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik tanggal 8 Agustus 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1107)
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 19 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Batubara Untuk Pembangkit Listrik Dan Pembelian Kelebihan Tenaga Listrik (Excess Power) tanggal 17 Februari 2017 (Berita Negara Rpublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 304)
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Percepatan Elektrifikasi di Pedesaan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1812)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.05/2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Divestasi Terhadap Investasi Pemerintah

C Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, Tanggal 21 Desember 2004 Uji Materiil Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 102)

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 111/ PUU-XIII/2015 tanggal 14 Desember 2016 tentang Uji Materiil Undang-Undang No. 30 Tahun 2009.

North Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1969,

Continental Casualty v. Argentina, ICSID Case No. ARB/03/9

Total v Argentina, ICSID Case No. ARB/04/1

Gugatan Perdata, Perkara No. 364/PDT GBTH PLW/2017/PN. JKT. PST Tanggal 14 Juli 2017

D. Paper, Makalah Seminar

Komar Kantaatmadja, *“Peran dan Fungsi Profesi Hukum Dalam Undang-Undang Perpajakan*, Bandung, Makalah Dalam Seminar Nasional Hukum Pajak, IMNO-Unpad, Juli 1985.

Yudistian Yunis, Manager Senior PLN Divisi Energi Baru Terbarukan, Seminar 6th IndoEBTKE ConEx di Balai Kartini, Jakarta, 14 September 2017

Paparan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM, *Penataan dan Penederhanaan Subsektor Ketenagalistrikan dan Perubahan Kedua PerMen ESDM No. 10 Tahun 2017*, Coffee Morning, 14 Maret 2018

D’Aspremont, Jean. 2011. *International Customary Investment Law: Story of a Paradox*, Amsterdam Center for International Law Research Paper No. 2011-08.

Michele Potestà. 2013. *Legitimate Expectations in Investment Treaty Law: Understanding the Roots and the Limits of a Controversial Concept*, Final version published in 28 ICSID Review

Nikiema, Suzy H. 2013. *Compensation for Expropriation*, International Institute for Sustainable Development, Canada.

E. Jurnal

Jurnal Hukum Bisnis. 2012. *Aspek Hukum Izin Usaha Tambang Dan Tanggung Jawab Pengusaha Tambang. Volume 31 – No. 2 – Tahun 2012*,

Jurnal Hukum Bisnis. 2003. *AFTA Dalam Perspektif Hukum Dan Ekonomi. Volume 22*.

Jurnal Hukum Bisnis. *Kajian Hukum Kontrak Dagang Internasional. Volume 27. No.4*.

Hadjon, P. M. (Januari 1998). *Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuursbevoegdheid). Pro Justitia Tahun XVI Nomor 1, 90 - 96*.

F. Media elektronik

<https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2014/07/CO14140.pdf>

<http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/CountryGroupingTreaties/15#iiaInnerMenu>

<http://mediaindonesia.com/read/detail/154715-investor-kelistrikan-minta-regulasi-berumur-panjang>

<http://www.coaltrans.com/articles/3802476/interview-heru-dewanto-president-director-pt-cirebon-power.html>.

<https://finance.detik.com/energi/d-3812339/divestasi-51-saham-freeport-rampung-juni-2018>

<http://setkab.go.id/tindak-lanjut-kesepakatan-global-perubahan-iklim-cop21-paris/>

<http://setkab.go.id/resmi-presiden-jokowi-izinkan-kerjasama-pemerintah-dengan-badan-usaha-bangun-infrastruktur/>

<https://industri.kontan.co.id/news/pengusaha-pesimistis-deregulasi-aturan-listrik-berhasil-dorong-investasi>

<http://www.Indonesiabriefing.com/news/introduction-Indonesias-reneble-energy-industry>

<http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA>

http://unfccc.int/essential_background/items/6031.php

http://legal.un.org/riaa/cases/vol_IV/60-66.pdf

<http://icsidreview.oxfordjournals.org/content/28/1/88.full.pdf+html>

<http://industri.kontan.co.id/news/tok-ruptl-2018-2027-resmi-disahkan14-Mar-18>